



Judul : BUMN Jadi Koperasi Picu Kekacauan Dunia Usaha
Tanggal : Senin, 05 Februari 2024
Surat Kabar : TV ONE
Halaman : 5

Kinerja Bisnis

BUMN Jadi Koperasi Picu kekacauan Dunia Usaha

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mengatakan, mengubah konsep badan usaha milik negara (BUMN) yang semula perusahaan menjadi koperasi hanya akan menyebabkan kekacauan di dunia usaha.

"Itu hanya akan menyebabkan kekacauan dunia usaha saja," katanya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (4/4).

Sarmuji menyampaikan dari sisi bisnis BUMN dan koperasi merupakan dua hal yang berbeda, hal itu dikarenakan koperasi hanya beranggotakan perorangan, sedangkan BUMN memiliki tanggung jawab kepada publik karena saham dari perusahaan tersebut merupakan milik negara.

Karena itu, ia menilai usulan untuk mengubah BUMN menjadi koperasi merupakan tindakan yang mengada-ada. "Itu usulan yang mengada-ada karena beda jenis," katanya pula.

Penugasan BUMN

Selain itu, dia mengatakan kontribusi BUMN terhadap perekonomian Indonesia sangat besar. Hal itu dapat dilihat dari penugasan yang sering diberikan untuk BUMN guna melakukan pembangunan di daerah, serta hal ini tidak bisa dilakukan bila men-

jadi koperasi.

"BUMN sering mendapatkan penugasan negara terhadap kegiatan ekonomi yang secara bisnis belum layak tapi secara ekonomi harus dilakukan, seperti pembangunan jalan tol di banyak daerah. Hal seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh badan usaha koperasi," katanya lagi.

Pada tahun 2023, BUMN tercatat menyumbangkan dividen untuk perekonomian Indonesia sebanyak Rp82,1 triliun, angka tersebut merupakan keuntungan yang terbesar dalam sejarah di Indonesia.

Sementara itu, pengamat infrastruktur dari Universitas Andalas Padang, Akhmad Suraji mengungkapkan badan usaha milik negara (BUMN)-BUMN infrastruktur berjasa dalam memperluas dan pemeratakan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia hingga wilayah terluar, terpencil, dan terbelakang.

"BUMN Infrastruktur seperti PLN, Jasa Marga, Pertamina, Pelindo, KAL, dan lainnya memiliki posisi utama sebagai pilar ekonomi negara untuk membuka kegiatan pengembangan perintisan investasi infrastruktur," ujar Akhmad Suraji, di Jakarta, Minggu (4/4).

■ Ant/E-10